

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Maraknya kecurangan yang dilakukan oleh berbagai pihak demi kepentingan individu maupun kelompok mendapatkan perhatian dari masyarakat. Kecurangan dilakukan baik oleh pihak golongan kelas bawah maupun golongan kelas atas, yang menyebabkan kerugian bagi entitas maupun pihak lain. Menurut **Holmes & Burn (2016:204)** tindak kecurangan (*fraud*) adalah suatu salah saji dari suatu fakta bersifat material yang diketahui tidak benar atau disajikan dengan mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran dengan maksud menipu pihak lain.

Kecurangan dalam lingkup akuntansi, merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan oleh suatu entitas yang menimbulkan kesalahan pada laporan keuangan yang disajikan dan penyalahgunaan aset pada entitas tersebut **Cressey (2018:112)**. Kecenderungan kecurangan akuntansi ditemukan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terkait dengan tidak tepatnya PTN mengelola keuangan (Shintadevi, 2015). Pada sektor swasta, bentuk kecurangan akuntansi terjadi dalam kasus ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber dana. Sektor pemerintahan pun tidak luput dari terjadinya kasus kecurangan akuntansi.

Menurut data dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab) tanggal 4 Juni 2020, Humas Setkab mempublikasikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintsh Pusat (LKPP) tahun 2020 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). BPK menemukan bahwa dari pemeriksaan 87 entitas pelaporan diperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap 80 kementerian lembaga/bendahara umum negara, wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap 6 kementerian lembaga, dan tidak menyatakan pendapat (TMP) atau *disclaimer* terhadap 2 kementerian lembaga. Permasalahan yang ditemukan pada 8 kementerian lembaga yang belum mendapatkan opini WTP itu, menurut Ketua BPK, secara umum meliputi permasalahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Belanja Barang, Belanja Modal, Piutang Bukan Pajak, Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Utang kepada Pihak Ketiga (<https://setkab.go.id/>).

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) menjadi tiga kelompok berdasarkan perbuatan diantaranya *asset misappropriation* atau penyimpangan atas aset, *fraudulent statements* atau pernyataan palsu, dan *corruption* atau korupsi. Penyimpangan atas aset meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan. Bentuk kecurangan ini mudah dideteksi karena bersifat *tangible* atau dapat dihitung. Pernyataan palsu atau salah memberikan pernyataan meliputi tindakan yang dilakukan pejabat atau eksekutif suatu instansi pemerintah atau perusahaan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa dalam menyajikan laporan keuangan agar memperoleh

laba. Korupsi merupakan jenis kecurangan yang sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama sama dengan pihak di luar instansi atau perusahaan (<https://acfe-indonesia.or.id/>).

Indonesia memiliki tingkat korupsi yang tinggi, hal tersebut tidak hanya dipersepsikan oleh masyarakat dalam negeri tetapi juga masyarakat luar negeri. *Transparency International* (TI) merupakan organisasi internasional di bidang akuntabilitas di mana menerbitkan *Corruption Perceptions Index* (CPI). TI menghitung CPI dengan cara memberi nilai atau skor dari 0 (*highly corrupt*) sampai dengan 100 (*very clean*). Skor CPI Indonesia tidak mengalami perubahan pada tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 37. Sebagai perbandingan, skor tersebut masih sangat jauh dibandingkan dengan skor CPI tahun 2020 yang diperoleh Negara New Zealand dan Denmark yaitu sebesar 89 dan 88 yang mana menempati peringkat 1 dan 2. Untuk kawasan ASEAN, negara yang menduduki peringkat tertinggi yaitu Singapura dengan skor 84 menduduki peringkat 6. Negara Brunei Darussalam (skor 62, peringkat 31), atau Malaysia (skor 47, peringkat 62) (<https://www.kpk.go.id/>).

Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir hasil survei soal tren penegakkan hukum kasus korupsi. Hasilnya, tersangka kasus korupsi dengan latar belakang Aparatur Sipil Negara (ASN) menempati urutan teratas selama tahun 2020 dengan jumlah tersangka sebanyak 495 orang. Diikuti oleh pihak swasta sebanyak 241 orang dan kepala desa sebanyak 102 orang tersangka. Data tersebut menunjukkan perubahan ketimbang pada tahun 2019 di mana ASN juga menjadi tersangka teratas

kasus korupsi sebanyak 515 orang. Tetap saja persentase ASN sebagai tersangka korupsi selama tahun 2020 masih tinggi yaitu sebesar 44% (www.mediaindonesia.com).

Menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* selama tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat termasuk 10 provinsi dengan kasus korupsi terbanyak sebesar kurang lebih 29 kasus dan kerugian sebesar 40,3 miliar rupiah. Anggota Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Sumatera Barat, Ronny Maryanto mengungkapkan sebanyak 8 kepala daerah di Sumatera Barat tersandung kasus korupsi semenjak digelarnya pemilihan kepada daerah (pilkada) secara langsung. Kondisi itu menandakan demokrasi yang terjadi di Indonesia rawan dengan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (www.mediaindonesia.com).

Kasus korupsi di Sumatera Barat diantaranya kasus dugaan suap sebesar 51,3 miliar rupiah yang dilakukan Bupati Solok Selatan terkait pengelolaan izin pertambangan. Kasus korupsi lainnya yaitu Bupati Kabupaten Agam sebagai penerima suap dan gratifikasi 2,3 miliar rupiah terkait proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agama (<https://nasional.tempo.co>). Mereka terjerat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Kerugian Negara yang telah diakibatkan sebesar 428 juta rupiah.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2020, Kota Padang berada pada peringkat 9 dari 12 Kota di Indonesia dengan poin 58,9. Kota Padang masih berada di bawah rata-rata persepsi korupsi tahun 2020 yang berada pada poin 60,8, yang mana pada rentang 0-100, poin 58,9 ini menandakan berada tipis di atas rata-rata. Sektor yang paling besar terdampak korupsi yaitu sektor perizinan disusul dengan sektor penerbitan kuota perdagangan. Integritas publik memiliki relasi yang erat dengan potensi korupsi. Daerah dengan integritas publik yang buruk memiliki potensi korupsi yang tinggi. Pada Kota Sumatera Barat Dinas Tata Ruang dan Bangunan memiliki probabilitas suap paling tinggi disusul dengan Kepolisian, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Pilar sistem integritas lokal merupakan pilar yang diharapkan dapat berkontribusi besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah Pusat, Kepala Daerah, dan Pengadilan juga dianggap sebagai pilar sistem integritas yang mampu menurunkan risiko korupsi. Kombinasi antar pilar yang dimiliki oleh kepala daerah maupun pemerintah pusat membuka harapan yang besar bagi upaya pemberantasan korupsi di daerah, akan tetapi, berdasarkan hasil IPK tahun 2020 kepala daerah dan pengadilan memiliki poin 3,3 dan 3,2 yang mana poin tersebut tergolong rendah untuk mencegah dan memberantas korupsi (<https://sumbar.inews.id/>).

Kota Padang dalam kasus kecenderungan kecurangan akuntansi telah berlangsung secara terus-menerus. Kecenderungan kecurangan akuntansi sendiri menarik banyak perhatian media dan dijadikan permasalahan penting bagi pebisnis

dunia. Kecurangan atau *fraud* merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Berikut ini hasil wawancara penulis kepada karyawan bagian keuangan pada BPKAD Kota Padang mengenai kecurangan akuntansi pada Instansi tersebut :

Tabel 1.1
Tabel Survey Faktor Penyebab Kecurangan Akuntansi
Pada BPKAD Kota Padang

NN	Bagian Intasi	Keterangan Kecurangan Akuntansi dalam Laporan Keuangan
1.	Penagihan	Berdasarkan survei yang dilakukan pada BPKAD Kota Padang, pegawai menjelaskan bahwa mereka lebih mengedepankan masih lemahnya pengawasan kepada kinerja karyawan berkaitan dengan penagihan, hal ini menyebabkan kadang karyawan tidak melaporkan hasil penagihan pajak kepada BPKAD Kota Padang, sehingga merugikan wajib pajak daerah yang dianggap tidak patuh.
2.	Pajak	Berdasarkan survei yang dilakukan pada BPKAD Kota Padang, pegawai menjelaskan bahwa kompensasi pada instansi tersebut sudah sesuai dengan kinerja karyawan. Akan tetapi kesesuaian kompensasi yang diberikan berdasarkan kinerja ini akan menimbulkan

		kesenjangan antara pegawai lain serta masih terdapat pegawai yang tidak disiplin sehingga kecurangan bisa saja terjadi di perusahaan.
3.	Aset	Berdasarkan survei yang dilakukan pada BPKAD Kota Padang, pegawai menjelaskan bahwa moralitas manajemen yang diterapkan kurang etis, hal ini menyebabkan ketergantungan dengan pimpinan Instansi untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Sumber : Hasil Interview, 2021

Berdasarkan tabel hasil survei pendahuluan yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa karyawan yang bekerja di BPKAD Kota Padang dapat disimpulkan bahwa pegawai BPKAD Kota Padang lebih mengedepankan budaya organisasi yang ada di perusahaannya. Budaya organisasi menjadi pedoman dalam setiap melakukan aktivitas di perusahaan. Apabila budaya organisasi yang terdapat di perusahaan tersebut etis, maka karyawan yang bekerja akan bersikap etis dan tentunya memiliki komitmen organisasi yang tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Arens (2018:427), terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan. Salah satu faktor pemicu dari terjadinya kecurangan tersebut yaitu adanya faktor *opportunity* (kesempatan) yang mengambil keuntungan melalui cara-cara yang merugikan. Kesempatan itu dapat berupa kelemahan yang melekat

pada sistem pengendalian internal yang terdapat di Instansi, yaitu proses kerja atau pengorganisasian kerja (*business process*) dengan kondisi antara lain yang pertama desain pengendalian internal yang kurang tepat, sehingga meninggalkan “celah”, kedua praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman (*common business sense*) yang berlaku, ketiga pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap implementasi *business process*, dan yang terakhir evaluasi yang tidak berjalan terhadap *business process* yang berlaku.

Faktor internal yang mempengaruhi kecurangan akuntansi yaitu pengendalian internal. Menurut **Mulyadi (2017:129)**, pengendalian internal merupakan suatu cara yang berperan sebagai pencegah dan pendeteksi kecurangan yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta sistem teknologi informasi yang ada di perusahaan. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, serta ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.

Banyaknya kasus kecurangan diakibatkan karena tidak adanya sistem pengendalian internal sehingga lemahnya pengawasan atau kontrol, tidak adanya kejujuran, peraturan dan kinerja kerja lemah sehingga para pembuat kejahatan leluasa dapat melakukan kecurangan tersebut. Selain itu dampak yang ditimbulkan kecurangan juga bisa berhubungan dengan karakter manusia itu sendiri. Karakter

manusia dapat dilihat dari kepribadian dan pola pikir mereka yang menyarankan bahwa kejujuran dan keadilan itu sangatlah penting dan tidak boleh dihilangkan dan harus ditingkatkan dan dipertahankan agar bias memondasi diri kita sendiri untuk tidak melakukan kecurangan.

Faktor internal lainnya yang mempengaruhi kecurangan akuntansi yaitu kesesuaian kompensasi. Menurut **Hasibuan (2017:119)**, kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan, yang dapat bersifat finansial maupun non finansial pada periode yang tetap. Kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan mempertahankan karyawan. Bagi organisasi, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja karyawan, bahkan dapat menyebabkan karyawan yang potensial keluar dari perusahaan.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada BPKAD Kota Padang, pegawai menjelaskan bahwa kompensasi pada perusahaan tersebut sudah sesuai dengan kinerja pegawai. Akan tetapi kesesuaian kompensasi yang diberikan berdasarkan kinerja ini akan menimbulkan kesenjangan antara karyawan lain serta masih terdapat karyawan yang tidak disiplin sehingga kecurangan bisa saja terjadi di perusahaan. Pegawai BPKAD Kota Padang menyatakan bahwa kompensasi pada instansi tersebut

sudah sesuai dengan kinerja pegawai akan tetapi kesesuaian kompensasi yang diberikan berdasarkan kinerja akan menimbulkan kesenjangan dengan karyawan lain yang tidak memiliki kinerja yang bagus dan tentunya tidak mendapatkan kesesuaian kompensasi berupa bonus. Hal ini dapat memicu terjadinya kecurangan di dalam perusahaan tersebut.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kecurangan akuntansi yaitu moralitas manajemen. Menurut **Baron (2018:233)**, moralitas manajemen adalah kemampuan memahami yang benar dan yang salah, artinya memiliki keyakinan yang kuat dalam bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga orang akan bersikap benar dan terhormat. Pemahaman dapat mencakup karakter utama, seperti kemampuan untuk memahami penderitaan orang lain dan juga tidak bertindak jahat, mampu mengendalikan dorongan, mendengarkan berbagai pihak sebelum memberikan penilaian, menerima dan menghargai perbedaan, mampu memahami pilihan yang tidak etis, dapat berempati, memperjuangkan keadilan, dan menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat terhadap orang lain.

Seseorang yang tidak bermoral cenderung akan bertindak untuk melakukan kecurangan yang akan merugikan bahkan membahayakan orang lain. Individu dengan moralitas yang tinggi diharapkan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis dan tidak melakukan kecurangan akuntansi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Suatu entitas yang memiliki penalaran moral yang tinggi lebih cenderung menghindari perbuatan yang mengarah kepada kecurangan akuntansi

Penelitian yang dilakukan oleh **(Putri & Laksmi, 2019)** yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa baik secara parsial maupun secara simultan sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan moralitas aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh **(Yu & Rha, 2021)** yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa system pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan moralitas individu tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh **(Erwinto et al., 2019)** yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa system pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan kesesuaian kompensasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh **(Puspasari & Suwardi, 2016)** yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Moralitas Individu dan Sistem Pengendalian

Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sedangkan system pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini merupakan gabungan dari beberapa penelitian sebelumnya, yang membedakan penelitian ini yaitu penggunaan objek yang berbeda dan tahun penelitian yang berbeda serta variabel independen system pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan moralitas manajemen.

Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Faktor Internal dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada BPKAD Kota Padang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang, maka penulis dapat menentukan indentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Banyaknya Instansi pemerintah yang mendapatkan opini tidak wajar pada laporan keuangannya.
2. Masih tingginya tingkat kecurangan akuntansi Intansi pemerintah di Kota Padang.

3. Masih lemahnya pengawasan internal kepada kinerja karyawan berkaitan dengan penagihan, hal ini menyebabkan kadang karyawan tidak melaporkan hasil penagihan pajak kepada BPKAD Kota Padang.
4. Kesesuaian kompensasi yang diberikan berdasarkan kinerja ini akan menimbulkan kesenjangan antara karyawan lain serta masih terdapat karyawan yang tidak disiplin sehingga kecurangan bisa saja terjadi di perusahaan.
5. Moralitas manajemen yang diterapkan kurang etis, hal ini ketergantungan dengan pimpinan Instansi untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
6. Banyaknya kasus kecurangan diakibatkan karena tidak adanya sistem pengendalian internal sehingga lemahnya pengawasan atau kontrol, tidak adanya kejujuran, peraturan dan kinerja kerja lemah sehingga para pembuat kejahatan leluasa dapat melakukan kecurangan.

1.3. Batasan Masalah

Untuk memberikan arahan dan memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan menganalisa variabel bebas yaitu system pengendalian internal(X_1), kesesuaian kompensasi (X_2) dan moralitas manajemen (X_3), variabel terikat yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi (Y) pada BPKAD Kota Padang.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, indentifikasi masalah dan batasan masalah yang diuraikan diatas maka rumusan masalah penetian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BPKAD Kota Padang ?
2. Bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BPKAD Kota Padang ?
3. Bagaimana pengaruh sistem moralitas manajemen terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BPKAD Kota Padang ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BPKAD Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BPKAD Kota Padang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem moralitas manajemen terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BPKAD Kota Padang.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruhfaktor internal dan moralitas manajemen terhadapkecenderungan kecurangan akuntansi pada BPKAD Kota Padang.

2. Bagi BPKAD Kota Padang

Memberikan masukan berupa saran dan informasi kepada pihak manajemen BPKAD tentang pengaruhfaktor internal dan moralitas manajemen terhadapkecenderungan kecurangan akuntansi dan dampak yang ditimbulkannya, sehingga untuk kedepanya BPKAD perfikir ulang dalam melakukan pengelolaan instansi.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut terutama tentang system pengendalian

internal, kesesuaian kompensasi, moralitas manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi.

4. Bagi Akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruhfaktor internal dan moralitas manajemen terhadapkecenderungan kecurangan akuntansi.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada penelitian selajutnya dan memperkaya penelitian yang berkaitan pengaruh faktor internal dan moralitas manajemen terhadapkecenderungan kecurangan akuntansi.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama yang berkaitan dengan kecenderungan kecurangan akuntansidan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya serta ilmu akuntansi keuangan pada umumnya.